

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Perlindungan hukum bagi UMKM telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, UMKM juga dilindungi dengan adanya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, dengan adanya PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UMKM dibatasi dengan adanya Pasal 434 ayat (1) huruf (c) mengenai larangan penjualan rokok secara eceran. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan koheren dengan peraturan perundang-undangan terkait yakni UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jenis penelitian ini yakni yuridis normatif didukung dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan sumber bahan non hukum berupa wawancara terhadap Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Analisis penelitian ini yakni analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan, tidak tepat ketentuan larangan penjualan rokok secara eceran dalam Pasal 434 ayat (1) huruf (c) PP No. 28 Tahun 2024 jika dikaitkan dengan tujuan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian, aturan larangan tersebut tidak koheren dengan Pasal 7 ayat (1) huruf (f) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM, Penjualan Rokok Eceran.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises play an important role in the development of the national economy. Legal protection for UMKM has been regulated in Law No. 20/2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises. In addition, UMKM are also protected by Guvernment Regulation No. 7 of 2021 on the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises and Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, with the existence of Government Regulation No. 28 of 2024 concerning the Implementation of Law No. 17 of 2023 concerning Health, UMKM are resticted by Article 434 paragraph (1) letter (c) regarding the prohibition of retails sales of cifarettes. Therefore, i tis necessary to examine whether the policy is appropriate and coherent with the relevant laws and regulations, namely Law No. 17 of 2023 concerning Health and Law No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises.

This type of research is normative juridical supported by primary, secondary, and tertiary legal sources, with non-legal sources in the form of interviews with the Bangkalan Regency Cooperative, Micro Business and Trade Office. The analysis of this research is prescriptive analysis by providing arguments to problems based on applicable laws and regulation.

The results of this study indicate that provision of a ban on retail sales of cigarettes in Article 434 paragraph (1) letter (c) of PP No. 28 of 2024 is not appropriate i fit is linked to the objectives of Law No. 17 of 2023 concerning Health. The, the prohibition is incoherent with Article 7 paragraph (1) letter (f) of Law No. 20 of 2008 concerning UMKM.

Keywords: *Legal Protectioon, UMKM, Retail Cigarette Sales.*